

Evaluasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Tanpa Kelas di RSUD

Nyi Ageng Serang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun Oleh :

NOVAN ADHI NUGRAHA

20140520019

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2020

NASKAH PUBLIKASI

**EVALUASI KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
TANPA KELAS DI RSUD NYI AGENG SERANG KABUPATEN KULON
PROGO TAHUN 2016**

Oleh:

**NOVAN ADHI NUGRAHA
20140520019**

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing

**Sakir, S.IP., M.IP
NIDN: 0506118902**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**

**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

**Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIDN: 0522086901**

**Dr. Muchamad Zaenuri, M. Si.
NIDN: 0528086601**

SINOPSIS

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan RSUD Nyi Ageng Serang untuk memberikan pelayanan kesehatan adalah kebijakan rumah sakit tanpa kelas. Kebijakan tersebut merupakan sebuah terobosan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan terhadap pelayanan kesehatan rumah sakit tanpa kelas di RSUD Nyi Ageng Serang Kabupaten Kulon Progo. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh Wiliam N Dunn.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pelayanan kesehatan rumah sakit tanpa kelas secara garis besar sudah memenuhi indikator kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi efektivitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil evaluasi kebijakan rumah sakit tanpa kelas di RSUD Nyi Ageng Serang sudah baik meskipun ada dua indikator yang tidak terpenuhi yaitu efisiensi dan pemerataan.

Kata Kunci: Evaluasi, Pelayanan, Rumah Sakit Tanpa Kelas

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan Indonesia merupakan hal yang dinamis memiliki arti bahwa model jaminan kesehatan dengan sasaran penduduk miskin tidak akan selalu dapat diandalkan untuk mencakup seluruh masyarakat miskin. Kita tidak dapat mengatakan bahwa semua orang miskin sudah ditanggung jika jumlah penerima bantuan sama dengan jumlah orang miskin, karena setiap hari ada penduduk yang menjadi miskin, ataupun yang lepas dari kemiskinan. Selain itu, jika jumlah penduduk miskin yang tercakup sama dengan jumlah total penduduk miskin, namun ada penduduk miskin yang tidak tercakup, jadi kualitas sistem kepesertaan termasuk apakah sistem tersebut *up-to-date* adalah titik kunci yang harus diperhatikan dalam melihat dampak penggunaan metode penentuan sasaran tersebut.

Sebagai penunjang bidang kesehatan, pemerintah pada khususnya pusat memberikan layanan yang memudahkan masyarakat pada sektor kesehatan. Salah satunya adalah jaminan kesehatan yang diberikan pada seluruh masyarakat Indonesia yang bisa digunakan oleh masyarakat tanpa pengecualian atau diskriminatif. Jaminan Kesehatan merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (Kemenkes RI, 2012).

Kemiskinan dan mahalnya akan biaya kesehatan merupakan salah satu penghambat bagi suatu negara berkembang dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat (Wulandari, 2015). Perubahan mekanisme yang mendasar

adalah adanya pemisahan peran pembayar dengan verifikator melalui penyaluran dana langsung ke Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dari Kas Negara, penggunaan tarif paket Jaminan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit (RS), penempatan pelaksana verifikasi di setiap RS, pembentukan Tim Pengelola dan Tim Koordinasi di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta penugasan PT Askes (Persero) dalam manajemen kepesertaan. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penjaminan terhadap masyarakat miskin yang meliputi sangat miskin, miskin dan mendekati miskin, program ini berganti nama menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut JAMKESMAS dengan tidak ada perubahan jumlah sasaran (Wulandari, 2015).

Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu Pemda yang sering melahirkan suatu inovasi yang baik. Kabupaten Kulon Progo yang merupakan salah satu daerah administrasi di Provinsi DIY melalui Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pula terciptalah suatu inovasi rumah sakit tanpa kelas untuk memberikan pelayanan kesehatan secara merata terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Inovasi rumah sakit tanpa kelas di gagas sendiri oleh Bupati Kulon Progo bapak Hasto Wardoyo (Handoyo, dkk. 2015). Sebagai seorang dokter yang terpilih menjadi bupati, Hasto Wardoyo diawal pemerintahannya langsung mengimplementasikan kepeduliannya pada warga miskin di Kabupaten Kulon Progo. Bentuk konkretnya adalah rumah sakit daerah tanpa kelas. Sistem tanpa kelas ini diterapkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nyi Ageng Serang.

Terkait pemenuhan pelayanan kesehatan, prinsipnya tetap sama, yakni penyederhanaan (*simplicity*).

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nyi Ageng Serang didirikan pada tahun 2013 dan diresmikan pada tanggal 12 november tahun 2014 oleh Bupati Kulonprogo Dr. Hasto Wardoyo,Sp.Og. Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang merupakan rumah sakit umum milik Pemerintah Kabupaten Kulonprogo. Rumah sakit Nyi Ageng Serang bertempat di Jl. Bantar Kulon, Banguncipto Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo.

Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang pada tahun 2015 menjadi salah satu nomine penerima *United Nation Public Service Award* (JawaPos.com, diakses tanggal 13-03-2015 pukul 19.32 WIB). Itu terjadi karena rumah sakit tersebut memiliki program andalan yang sangat pro terhadap pelayanan kesehatan rakyat miskin. Program tersebut adalah rawat inap warga miskin tanpa kelas. Konsepnya sederhana dan tidak membutuhkan banyak biaya. Dengan program itu, tidak ada lagi cerita pasien ditolak rawat inap di RSUD Nyi Ageng Serang. Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa sebelum adanya inovasi ini pasien miskin di Kabupaten Kulonprogo yang dibiayai Jamkesmas, Jamkesda, atau sekarang BPJS, apabila rawat inap, mendapat jatah di kelas III. Namun, karena kapasitas ruang rawat inap di kelas III terbatas, banyak pasien miskin yang terpaksa ditolak saat akan menjalani rawat inap. Mereka harus masuk daftar tunggu untuk antre rawat inap. Permasalahan ini pula yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya inovasi rumah

sakit tanpa kelas di Kabupaten Kulonprogo (JawaPos.com, diakses tanggal 13-03-2015 pukul 19.32 WIB).

Inovasi kebijakan rumah sakit tanpa kelas bukan berarti RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Nyi Ageng Serang menghilangkan semua kelas III, II, I, VIP, maupun VVIP, akan tetapi semua kelas yang berada di rumah sakit bisa dipakai dengan catatan untuk masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan dengan hak rawat inap kelas III penuh atau melebihi kapasitas yang berada di Rumah Sakit Nyi Ageng Serang maka pasien rawat inap tetap mendapatkan pelayanan dengan menempati seluruh ruang rawat inap dengan catatan ruang rawat inap kelas III penuh maka pasien di pindahkan ke kelas atasnya yaitu di kelas II atau Kelas I, bahkan bisa ditempatkan di kelas VIP. Tarif yang dikenakan sesuai dengan tarif kelas III. Perpindahan ini bersifat sementara, apabila kelas III sudah kosong maka pasien yang berada di kelas II, I, dan VIP di pindahkan kembali sebagaimana haknya semula di kelas III.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) data penelitian diperoleh secara langsung dari lapangan, dan bukan dari laboratorium atau penelitian terkontrol; (2) penggalan data dilakukan secara alamiah, melakukan kunjungan pada situasi-situasi alamiah subyek; dan (3) untuk memperoleh makna baru dalam bentuk kategori-kategori jawaban, peneliti wajib mengembangkan situasi dialogis sebagai situasi ilmiah (Agus Salim dalam Sakir, 2015: 30). Metode analisis-

deskriptif dilakukan dengan cara memberikan keterangan dan gambaran yang sejeleas-jelasnya secara sistematis, objektif, kritis dan analitis mengenai Evaluasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Tanpa Kelas di RSUD Nyi Ageng Serang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dan RSUD Nyi Ageng Serang Kulon Progo dengan rasionalisasi sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam latar belakang.

C. TEORI

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah Kriteria Evaluasi yang dikemukakan oleh Wiliam N Dunn sebagai berikut :

1. Efektivitas
 - a. Kejelasan tujuan kebijakan atau program rumah sakit tanpa kelas
 - b. Ketepatan kebijakan atau program rumah sakit tanpa kelas
2. Efisiensi
 - a. Ketepatan penggunaan anggaran kebijakan rumah sakit tanpa kelas
3. Kecukupan
 - a. Kecukupan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan rumah sakit tanpa kelas
 - b. Kecukupan dalam aspek kebutuhan nilai dari kebijakan rumah sakit tanpa kelas
4. Pemerataan

- a. Manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan kebijakan dari rumah sakit tanpa kelas merata
5. Responsivitas
- a. Kepuasan masyarakat terhadap kebijakan rumah sakit tanpa kelas
6. Ketepatan
- a. Pelaksanaan kebijakan rumah sakit tanpa kelas sudah tepat kepada masyarakat yang membutuhkan.

D. PEMBAHASAN

1. EFEKTIVITAS

Efektivitas adalah sebuah tolok ukur target yang menentukan tercapai atau tidaknya sebuah upaya yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Tolok ukur tersebut bisa berupa kualitas, waktu dan jumlah. Inti dari sebuah efektivitas kebijakan adalah penilaian sebuah kebijakan apakah mampu mencapai tujuan atau *goal* yang telah ditetapkan sebuah organisasi pemerintahan (Dunn,2003:610). Dalam sub-bab ini, kebijakan rumah sakit tanpa kelas akan dinilai keefektivasannya atau bisa dikatakan peneliti akan menilai apakah penyelenggaraan kebijakan rumah sakit tanpa kelas sudah efektif.

Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang merupakan salah satu rumah sakit hasil inovasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kulon Progo. Inovasi peningkatan pelayanan kesehatan tersebut dimanifestasikan ke dalam kebijakan rumah sakit tanpa kelas.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan PLH Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, kebijakan rumah sakit tanpa kelas adalah sebuah kebijakan yang memberikan ruang rawat inap bersifat sementara apabila ruang rawat inap kelas 3 penuh maka pasien dapat dipindahkan ke kelas atasnya seperti kelas 2, apabila ruang rawat kelas 3 sudah kosong maka pasien yang awalnya berada di kelas 2 dipindahkan ke kelas 3. Kebijakan ini ditujukan untuk menghindari penolakan pasien oleh rumah sakit jika rawat inap bangsal kelas 3 penuh, pasien akan langsung bisa dipindahkan ke kelas di atasnya tanpa perlu menjalani proses administrasi yang rumit. Selain itu kebijakan ini juga ditujukan untuk melindungi orang-orang miskin pemegang kartu BPJS agar mereka bisa segera dirawat meskipun bangsal kelas 3 penuh.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu dr. Sandrawati Said selaku Direktur Rumah Sakit Nyi Ageng Serang ditemukan bahwa penyelenggaraan RSUD Nyi Ageng Serang merupakan kelanjutan dari RSUD Wates. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ibu Sri Yuli Nurlaeni selaku Kepala Pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang.

Berikut di bawah ini adalah kutipan wawancara dengan Ibu Sri Yuli Nurlaeni.

“Iya Mas, jadi bisa dikatakan RSUD Nyi Ageng Serang ini adiknya RSUD Wates. Kami sama-sama menerapkan kebijakan atau inovasi pelayanan tanpa kelas itu. “

Beberapa layanan yang cukup lengkap di RSUD Nyi Ageng Serang merupakan salah satu upaya bertahap RSUD Nyi Ageng Serang untuk menaikkan

status RSUD Nyi Ageng Serang dari rumah sakit kelas D menuju kelas C. Tahapan pembangunan dan peningkatan jenis layanan yang dilakukan oleh pihak RSUD Nyi Ageng Serang dimulai dari tahun 2014 dan diharapkan akan selesai pada tahun 2020. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ibu Sri Yuli Nurlaeni, selaku Kepala Pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang.

Berikut di bawah ini adalah kutipan wawancara dengan Ibu Sri Yuli Nurlaeni

“Dari mulai peresmian RSUD Nyi Ageng serang rumah sakit ini masih tipe D dan pada tahun 2014 rumah sakit ini mulai membangun fasilitas-fasilitas rumah sakit untuk menjadikan rumah sakit ini menjadi tipe C.”

Penilaian kinerja pelayanan Rumah Sakit Nyi Ageng Serang pada tahun 2016 terdiri atas beberapa indikator antara lain:

Tabel 1.1. Tabel Indikator Kinerja RSUD Nyi Ageng Serang 2015-2016

TAHUN	BOR	LOS	TOI	NDR	GDR
2015	36,8%	2,88%	5,29%	0%	0%
2016	61,68%	3,02%	2,49%	8,65%	16,44%

Sumber: (Profil RSUD Nyi Ageng Serang, 2018)

Berdasarkan tabel di atas ditemukan bahwa angka indikator kinerja pelayanan rumah sakit dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 BOR mengalami peningkatan sebesar 24,88%, sedangkan untuk angka LOS mengalami kenaikan sebesar 0,14%, selanjutnya untuk angka TOI mengalami penurunan sebesar 2,80% , kemudian untuk

angka NDR mengalami kenaikan sebesar 8,65%, dan untuk angka GDR mengalami kenaikan sebesar 16,44%.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu dr.Sandrawati Said kenaikan angka BOR dikarenakan pada tahun 2016 jumlah kunjungan masyarakat yang melakukan rawat inap ke RSUD Nyi Ageng Serang mengalami peningkatan sebanyak 87% . Penyebab kenaikan angka indikator LOS sama dengan penyebab kenaikan angka BOR. Sedangkan untuk kenaikan angka NDR dan GDR disebabkan oleh kenaikan jumlah pasien penderita sakit berat seperti (kanker dan liver). Data- data tersebut menjadi patokan RSUD Nyi Ageng Serang untuk menilai efektivitas pelayanan kebijakan kesehatan rumah sakit tanpa kelas. Menurut klaim dari narasumber, pada tahun 2016 pelaksanaan penyelenggaraan rumah sakit tanpa kelas sudah efektif karena sudah sesuai standar penghitungan dengan Grafik Barber Johnson.

Ibu Sri Yuli Nurlaeni selaku Kepala Pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang mengungkapkan bahwa tujuan kebijakan rumah sakit tanpa kelas yang diimplementasikan di RSUD Nyi Ageng Serang sudah jelas karena kebijakan rumah sakit tanpa kelas bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat miskin khususnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Nyi Ageng Serang. Selain itu kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi kejadian penolakan pasien akibat tidak adanya bangsal di kelas 3 maupun kelas 2. Pendapat tersebut juga dibenarkan oleh dr. Sandrawati Said selaku Direktur RSUD Nyi Ageng Serang.

Berikut di bawah ini kutipan wawancara dengan Ibu dr. Sandrawati Said.

*“Ya tujuan kebijakan rumah sakit tanpa kelas kalau saya lihat dan saya rasa sudah jelas mas, ingin membantu masyarakat miskin yang menggunakan BPJS untuk naik kelas kalau ruangan di kelas 3 sudah penuh. Intinya PEMDA Kulon Progo ingin inovasi dari kebijakan ini dapat mengurangi kejadian penolakan pasien dan meningkatkan akses masyarakat untuk berobat.” *

Ibu dr. Sandrawati Said menambahkan bahwa kebijakan rumah sakit tanpa kelas sudah tepat karena pada tahun 2016 angka kunjungan pasien di RSUD Nyi Ageng Serang meningkat dari tahun sebelumnya. Beliau mengungkapkan bahwa hal tersebut menjadi bukti kebijakan rumah sakit tanpa kelas sudah tepat karena dengan kemudahan akses yang diberikan maka kunjungan pasien untuk berobat ke RSUD Nyi Ageng Serang meningkat. Bapak dr. Ananta Kogam selaku PLH Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo . Beliau mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan rumah sakit tanpa kelas di RSUD Wates dan RSUD Nyi Ageng Serang sudah tepat karena pada tahun 2016 cakupan BOR di kedua rumah sakit tersebut cukup tinggi.

Penilaian efektivitas sebuah pelaksanaan kebijakan berdasarkan definisi operasional yang sudah ditetapkan adalah kejelasan tujuan dan ketepatan pelaksanaan kebijakan rumah sakit tanpa kelas serta target kebijakan yang ditetapkan sudah jelas. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan rumah sakit tanpa kelas yang dilaksanakan RSUD Nyi Ageng Serang tahun 2016 bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kulon Progo. Beberapa narasumber yang diwawancarai oleh peneliti memaparkan bahwa tujuan dari kebijakan rumah sakit tanpa kelas sudah jelas karena kebijakan tersebut

memang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di Kulon Progo pada khususnya. Selain itu dapat dilihat bahwasanya tujuan dari kebijakan rumah sakit tanpa kelas ini sudah jelas karena sesuai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan dan meningkatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat di Kulon Progo.

Berdasarkan pemaparan Ibu Sri Yuli Nurlaeni pelaksanaan pelayanan kebijakan rumah sakit tanpa kelas sampai pada tahun 2016 tidak pernah mengalami penumpukan maupun penolakan pasien. Dalam wawancaranya beliau mengklaim bahwa pasien dapat di rawat inap di RSUD Nyi Ageng Serang tanpa ada penolakan. Beliau mengklaim bahwa pada tahun 2016 belum pernah ada laporan atau komplain mengenai proses pemindahan kelas pasien ketika ruang rawat inap kelas 3 penuh. Selain itu beliau menambahkan bahwa mekanisme pemindahan pasien dari ruangan kelas 3 menuju kelas 2 maupun kelas 1 sudah dipermudah. RSUD Nyi Ageng Serang akan langsung merujuk pasien kelas 3 ke kelas 2 maupun kelas 1 jika kapasitas ruangan rawat inap kelas 3 penuh. Dalam proses ini RSUD Nyi Ageng Serang menjadi pihak yang proaktif dan bertanggung jawab untuk mengurus pemindahan kelas, pasien hanya perlu mengikuti instruksi dari RSUD Nyi Ageng Serang tanpa perlu menyiapkan biaya tambahan.

Ibu dr. Sandrawati Said selaku direktur RSUD Nyi Ageng Serang dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa kebijakan rumah sakit tanpa kelas itu diimplementasikan ke dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk menentukan

target dan capaian kebijakan rumah sakit tanpa kelas, RSUD Nyi Ageng Serang menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berupa Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat. Komponen penilaian indikator kinerja RSUD Nyi Ageng Serang berupa capaian kinerja mutu pelayanan, capaian kinerja kepedulian kepada masyarakat, capaian kinerja kepuasan pelanggan, cakupan kinerja kepedulian terhadap lingkungan. Berikut di bawah ini adalah tabel Indikator Kinerja RSUD Nyi Ageng Serang pada tahun 2016 :

Tabel 1. 2 Capaian Kinerja RSUD Nyi Ageng Serang Tahun 2016

Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Satuan	Target Renstra 2016	Realisasi	Target Akhir 2021	Persentase Capaian 2016 terhadap Target Akhir 2021
Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat	((Capaian kinerja mutu pelayanan + capaian kinerja kepedulian kepada masyarakat + capaian kinerja kepuasan pelanggan + cakupan kinerja kepedulian terhadap lingkungan) /40) x 100%	%	71,90	92,50	98,75	93,67

Sumber: (LKjIP RSUD Nyi Ageng Serang, 2016)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat sampai dengan tahun 2016 berhasil dilaksanakan dengan angka 92,50% atau 20,60% di atas target yang telah ditentukan yaitu 71,90%. Menurut Ibu Sri Yuli Nurlaeni selaku Kepala Pelayanan mengatakan bahwa capaian kinerja pada tahun 2016 sudah melebihi target yang telah ditentukan maka Pemerintah Kulon Progo sudah puas dengan hasil yang dicapai oleh RSUD Nyi Ageng Serang.

Berdasarkan pemaparan narasumber pelaksanaan rumah sakit tanpa kelas sudah tepat sasaran yang ditujukan kepada masyarakat miskin supaya tidak terjadi penolakan pasien rawat inap di RSUD Nyi Ageng Serang. Pasien yang mempunyai jaminan kesehatan atau BPJS dapat berobat di RSUD Nyi Ageng Serang tanpa ada penolakan dari pihak rumah sakit. Rumah sakit menampung semua pasien yang ingin berobat dan menjalani rawat inap.

Target kebijakan rumah sakit tanpa kelas tahun 2016 sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh RSUD Nyi Ageng Serang, dapat dilihat bahwa dengan meningkatnya jumlah BOR yang mencapai 61,68% pada tahun 2016 maka RSUD Nyi Ageng Serang sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Selain target BOR meningkat pada tahun 2016, indikator kinerja RSUD Nyi Ageng Serang telah tercapai pada angka 92,50% sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 71,90%.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan rumah sakit tanpa kelas yang diimplementasikan di RSUD Nyi Ageng Serang sudah efektif

karena kebijakan tersebut sudah tepat menyoar ke masyarakat miskin pemegang kartu BPJS, tujuan dari kebijakan tersebut untuk meningkatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat miskin khususnya sehingga dapat dikatakan kebijakan rumah sakit tanpa kelas sudah jelas dan target yang ditetapkan oleh RSUD Nyi Ageng Serang pada tahun 2016 sudah tercapai.

2. EFISIENSI

Efisiensi adalah ketepatan dalam pemanfaatan sumberdaya dan ketepatan dalam penggunaan biaya dengan manfaat yang menghasilkan. Efisiensi dapat dikatakan dalam sebuah organisasi atau dengan kata lain sebuah organisasi dalam menjalankan program harus bisa memanfaatkan sumberdaya keuangan dengan sebaik-baiknya, salah satunya adalah dalam penggunaan anggaran. Dalam penelitian ini akan dinilai efisiensi RSUD Nyi Ageng Serang dalam menggunakan anggaran untuk melaksanakan kebijakan rumah sakit tanpa kelas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dr. Ananta Kogam yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2019 ditemukan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang pada Tahun 2015 merupakan salah satu rumah sakit binaan Dinas Kesehatan. Binaan yang dimaksud adalah pada tahun 2015 segala jenis pembiayaan belanja masih menjadi satu dalam alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Namun pada tahun 2016, alokasi anggaran untuk RSUD Nyi Ageng Serang sudah dipisahkan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo karena

pada tahun 2016 RSUD Nyi Ageng Serang sedang melalui proses pembentukan OPD baru. Berikut di bawah ini hasil wawancara dari Bapak dr. Ananta Kogam selaku PLH Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo:

“kalu pada tahun 2015 memang anggaran RSUD Nyi Ageng Serang masih melalui sini (Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo) namun pada tahun 2016 RSUD Nyi Ageng Serang disiapkan untuk menjadi OPD sendiri dan PPKBULD sehingga pada tahun tersebut anggarannya langsung dari Pemerintah Daerah.”

Pernyataan dari Bapak dr. Ananta Kogam sesuai dengan pernyataan dari Ibu dr. Sandrawati Said selaku Direktur RSUD Nyi Ageng Serang. Dalam wawancaranya beliau menyebutkan bahwa alokasi anggaran yang diperoleh RSUD Nyi Ageng Serang berasal langsung dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Beliau menyebutkan bahwa anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupa biaya operasional RSUD Nyi Ageng Serang dan belanja pegawai RSUD Nyi Ageng Serang. Jumlah anggaran pada tahun 2016 meningkat dari tahun 2015 karena RSUD Nyi Ageng Serang merencanakan penambahan ruangan rawat inap baru dan beberapa ruangan operasi.

Tabel 1. 3 Anggaran RSUD Nyi Ageng Serang

Tahun	Nominal	Realisasi
2016	Rp.16.793.741.868,00	Rp.15.965.810.394,00

Sumber: (LKjIP RSUD Nyi Ageng Serang, 2016)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa RSUD Nyi Ageng Serang pada tahun 2016 mendapatkan anggaran dari Pemerintah Daerah sebesar Rp.16.793.741.868,00 hanya terealisasi sebesar Rp.15.965.810.394,00. RSUD Nyi Ageng Serang tidak dapat terserap semua anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Yuli Nurlaeni selaku Kepala Pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang ditemukan bahwa pada tahun 2016 RSUD Nyi Ageng Serang mengeluarkan kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas dan penghematan belanja penggandaan. Beliau mengungkapkan kebijakan tersebut ditetapkan oleh RSUD Nyi Ageng Serang karena kedua alokasi anggaran pengeluaran tersebut dinilai kurang bermanfaat bagi RSUD Nyi Ageng Serang sehingga pihak rumah sakit melakukan penghematan anggaran untuk kedua jenis pengeluaran tersebut.

Ibu Sandrawati Said mengungkapkan bahwa penghematan anggaran tersebut menyebabkan serapan anggaran RSUD Nyi Ageng Serang pada tahun 2016 sebanyak Rp.15.965.810.394,00 atau 95,07%. Berikut dibawah ini kutipan wawancara dengan Ibu Sandrawati Said:

“Untuk anggaran dari pemerintah kita tidak menghabiskannya semua mas dari 16M sekian hanya terserap 15,9M sekian, setelah didiskusikan ya kita putuskan untuk penghematan belanja perjalanan dinas dan penghematan belanja penggandaan karena hal tersebut tidak terlalu bermanfaat buat rumah sakit.”

Berdasarkan pemaparan narasumber dan data yang telah ditemukan serta temuan data dilapangan menunjukkan bahwa serapan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak maksimal karena RSUD Nyi Ageng Serang mengimplementasikan kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas dan penghematan belanja penggandaan. Setelah pihak RSUD Nyi Ageng Serang mengimplementasikan kebijakan penghematan tersebut, serapan anggaran dari pemerintah menjadi tidak efisien dan seharusnya pihak rumah sakit mempertimbangkan secara seksama sebelum melakukan penetapan penghematan anggaran sehingga di tahun-tahun berikutnya hal yang sama tidak terulang kembali. Dapat disimpulkan bahwa indikator efisiensi tidak terpenuhi karena anggaran dari pemerintah tidak terserap secara maksimal.

3. KECUKUPAN

Kecukupan adalah penilaian dalam pencapaian hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diinginkan. Kecukupan dapat dikatakan sebagai tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam kebijakan ini. Kecukupan bertepatan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan. Pada sub-bab ini peneliti akan menilai seberapa jauh efektivitas kebijakan rumah sakit tanpa kelas dalam memuaskan kebutuhan masyarakat.

Peneliti mewawancarai Ibu dr. Sandrawati Said selaku direktur RSUD Nyi Ageng Serang pada tanggal 27 Maret 2019. Dalam wawancara tersebut Ibu dr. Sandrawati Said mengungkapkan bahwa capaian kinerja pelayanan rumah sakit tanpa kelas di RSUD Nyi Ageng Serang pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2015 (kenaikan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1.). Dari tabel 3.1. tersebut terlihat kenaikan jumlah kunjungan rawat inap pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 87 %. Beliau mengungkapkan peningkatan kunjungan dan capaian indikator BOR, LOS, TOI disebabkan karena RSUD Nyi Ageng Serang menambah jumlah tempat tidur, bangsal dan fasilitas serta tenaga dokter. Penambahan fasilitas tersebut menambah cakupan pasien di RSUD Nyi Ageng Serang sehingga kunjungan pasien di RSUD Nyi Ageng Serang meningkat.

Peningkatan tersebut tercapai dengan meningkatnya jumlah kunjungan rumah sakit yang meningkat, maka Ibu dr Sandrawati Said selaku direktur RSUD Nyi Ageng Serang menyatakan bahwa beliau merasa puas dengan peningkatan tersebut, karena dengan meningkatnya angka kunjungan dan kinerja RSUD Nyi Ageng Serang hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa kerja nyata Pemerintah Kulon Progo dan segenap elemen RSUD Nyi Ageng Serang dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat berbuah hasil yang sangat baik.

Pernyataan Ibu dr. Sandrawati Said tersebut dibenarkan oleh Ibu Sri Yuli Nurlaeni selaku Kepala Pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang

“Kami, terutama saya puas mas dengan meningkatnya kinerja rumah sakit, fasilitas sama jumlah pasien yang datang ke sini, dan kinerja kita juga baik untuk melayani pasien juga sudah secara maksima, insyaAllah akan ditingkatkan terus tahun depan mas”

Pendapat senada juga dipaparkan oleh Bapak Romadhon selaku pasien yang pernah melakukan rawat inap di RSUD Nyi Ageng Serang pada tahun 2015 dan 2016. Dalam wawancaranya beliau mengungkapkan bahwa ada perbedaan pelayanan pada tahun 2015 dan 2016. Fasilitas rumah sakit pada tahun 2015 belum selengkap dan sebagus di tahun 2016, selain itu pada tahun 2015 jumlah pasien yang melakukan rawat inap tidak sebanyak dibandingkan dengan tahun 2016. Bapak Romadhon dalam wawancaranya mengaku puas dengan kinerja pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang pada tahun 2016 karena ada peningkatan fasilitas dan pelayanan di rumah sakit.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tercapainya kinerja RSUD Nyi Ageng Serang dan pelaksanaan kebijakan rumah saki tanpa kelas yang sudah efektif dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang berobat di RSUD Nyi Ageng Serang. Tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan dan kinerja rumah sakit yang tinggi dapat memberikan kepuasan kepada beberapa pihak. Tercapainya indikator rumah sakit dan meningkatnya kunjungan pasien rawat inap di RSUD Nyi Ageng serang menjadi tolok ukur pelaksanaan kebijakan rumah sakit tanpa kelas di RSUD Nyi ageng Serang sudah memenuhi indikator kecukupan.

4. PEMERATAAN

Komponen evaluasi yang keempat dalam penelitian ini adalah pemerataan. Dalam penelitian ini pemerataan yang dimaksud adalah manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan kebijakan rumah sakit tanpa kelas merata untuk seluruh masyarakat Kulon Progo. Pada sub-bab ini peneliti akan menilai pemerataan manfaat pelaksanaan kebijakan rumah sakit tanpa kelas di RSUD Nyi Ageng Serang.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sri Yuli Nurlaeni selaku Kepala Pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang ditemukan bahwa sasaran dari kebijakan rumah sakit tanpa kelas yang diimplementasikan di RSUD Nyi Ageng Serang adalah seluruh masyarakat pemegang kartu BPJS di Kabupaten Kulon Progo pada umumnya dan masyarakat miskin di Kabupaten Kulon Progo pada khususnya. Pasien rawat inap tidak hanya dari Kecamatan Sentolo, tetapi pasien juga berasal dari kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Kulon Progo. RSUD Nyi Ageng Serang hanya mencatat alamat pasien dan tidak menentukan kuota kunjungan pasien rawat inap di RSUD Nyi Ageng Serang.

Pendapat Ibu Sri Yuli Nurlaeni kemudian ditambahkan oleh Ibu dr. Sandrawati Said selaku Direktur RSUD Nyi Ageng Serang. Ibu dr. Sandriawati Said menambahkan bahwa dalam evaluasi pelayanan dan pelaksanaan kebijakan rumah sakit tanpa kelas di RSUD Nyi Ageng tidak menggunakan indikator pemerataan karena prinsip pelayanan yang dimiliki oleh RSUD Nyi Ageng Serang

adalah adil terhadap semua pasien. Selain itu beliau menambahkan bahwa RSUD Nyi Ageng Serang tidak melakukan pembatasan pasien yang berobat di RSUD Nyi Ageng Serang.

Berikut di bawah ini adalah kutipan wawancara dengan Ibu dr. Sandrawati Said.

“Kuota selama ini berapapun pasien yang datang kami rawat mas, dirawat jalan juga tidak pernah menolak pasien, hanya ada beberapa spesialis yang kelebihan kuota dan dibatasi. Kami juga ndak pakai itu mas pemerataan, karena prinsip kami ya melayani semua sesuai kemampuan,”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa peneliti tidak dapat melihat pemerataan manfaat dari pelaksanaan kebijakan rumah tanpa kelas yang dilaksanakan di RSUD Nyi Ageng Serang. Meskipun pelaksanaan kebijakan rumah sakit tanpa kelas tidak bisa dikatakan merata namun Masyarakat Kabupaten Kulon Progo mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Nyi Ageng Serang. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan rumah sakit tanpa kelas tidak merata karena RSUD Nyi Ageng Serang tidak menargetkan jumlah pasien yang menggunakan pelayanan rumah sakit tanpa kelas dan pihak RSUD Nyi Ageng Serang juga tidak membatasi kuota pasien rawat inap.

5. RESPONSIVITAS

Responsivitas adalah tolok ukur suatu kebijakan untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Kriteria responsivitas penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya adalah efektifitas, efisien, kecukupan. Pada sub-bab ini peneliti akan menilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit tanpa kelas. Peneliti melakukan wawancara dengan pasien pengguna BPJS pada tanggal 26 Maret 2019, wawancara tersebut ditujukan untuk mendapatkan data yang kemudian akan dinilai menggunakan indikator kelima dalam sebuah kegiatan evaluasi yaitu responsif. Pasien yang diwawancarai berjumlah 5 orang yaitu Ibu Juminem yang berprofesi sebagai petani dan Ibu Sitriani sebagai ibu rumah tangga, Bapak Romadhan yang berprofesi sebagai karyawan swasta, Bapak Joko Santoso yang berprofesi sebagai buruh serta Bapak Parjiman yang berprofesi sebagai petani

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan Ibu Juminem sebagai pasien yang dirawat inap mengungkapkan bahwa Ibu Juminem merasa puas dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Nyi Ageng Serang karena perawat yang berada di rumah sakit melayani dengan baik dan cepat dalam menangani pasien. Beliau merasa puas dan diuntungkan dengan kebijakan rumah sakit tanpa kelas karena kebijakan tersebut mempermudah dirinya dan pasien lain untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Nyi Ageng Serang juga lebih

terjangkau daripada biaya pengobatan di rumah sakit swasta. Selain itu beliau mengungkapkan bahwa syarat untuk mendapatkan BPJS tidak sulit, syarat tersebut berupa surat rujukan dari PUSKESMAS dengan membawa fotocopy KTP, KK, dan KIS.

Setelah sesi tanya jawab yang dilakukan oleh Ibu Juminem tersebut berdasarkan kebijakan pelayanan rumah sakit tanpa kelas yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2019 sama dengan pendapat oleh Ibu Sitriani selaku pasien lainnya yang dirawat inap berbendapat sebagai berikut:

“Ya mas, saya merasa puas karena pelayanannya baik dan cepat karena dokternya ramah dan perawat yang berjaga juga baik dan ramah. Terus untuk mendapatkan BPJS, saya mengurusnya tidak susah mas, karena dibantu oleh petugasnya”.

Ibu Sitriani selaku pasien yang dirawat di RSUD Nyi Ageng Serang mengungkapkan bahwa pelayanan rumah sakit baik dan cepat tanggap dalam menangani pasien.

Respon yang positif dari pasien RSUD Nyi Ageng Serang disebabkan oleh pengalaman interaksi pasien dan pegawai RSUD Nyi Ageng Serang. Berdasarkan wawancara dari ibu Sri Yuli Nurlaeni selaku kepala pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang ditemukan bahwa kinerja pegawai yang ada di rumah sakit sudah diatur dengan sebuah SOP (Standar Operasional Pegawai). Dalam SOP tersebut pegawai rumah sakit dituntut untuk berperilaku ramah dan cepat tanggap dalam menangani pasien termasuk. Ibu Sri Yuli Nurlaeni menambahkan bahwa SOP tersebut juga

sejalan dengan motto dan kebudayaan kerja di RSUD Nyi Ageng Serang. Selain itu menurut beliau standar layanan pegawai yang ramah dan cepat tanggap di RSUD Nyi Ageng Serang merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh RSUD Nyi Ageng Serang.

Berdasarkan pemaparan di atas selanjutnya peneliti akan menganalisis indikator responsivitas kebijakan rumah sakit tanpa kelas di RSUD Nyi Ageng Serang. Temuan data di lapangan menunjukkan bahwa beberapa pasien yang mendapatkan pelayanan di RSUD Nyi Ageng Serang memberikan respon yang positif dan mereka (pasien) sudah merasa puas dengan kebijakan rumah sakit tanpa kelas.

Komponen kepuasan yang didapatkan dari narasumber berupa pelayanan perawat yang ramah dan cepat, mekanisme untuk memperoleh layanan BPJS mudah dan pasien merasa diuntungkan secara finansial dengan adanya kebijakan tersebut. Selain itu berdasarkan pemaparan narasumber, keramahan dan responsivitas pegawai RSUD Nyi Ageng Serang dibentuk melalui budaya organisasi dan standar operasional rumah sakit yang baik sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik dari RSUD Nyi Ageng Serang.

Uraian di atas menjadi dasar bagi peneliti untuk memberikan penilaian responsivitas mengenai pelaksanaan kebijakan rumah sakit tanpa kelas di RSUD Nyi Ageng Serang. Beberapa fakta yang ditemukan di lapangan seperti; respon

positif dari narasumber mengenai pelayanan yang diberikan oleh pegawai RSUD Nyi Ageng S Serang kepada pasien dan standar operasional pegawai yang baik menjadi dasar peneliti untuk memberikan penilaian bahwa indikator responsivitas dalam pelaksanaan kebijakan rumah sakit tanpa kelas di RSUD Nyi Ageng Serang sudah terpenuhi.

6. KETEPATAN

Ketepatan adalah ukuran untuk mengetahui hasil dan tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai untuk kelompok. Pada sub-bab ini peneliti akan menilai ketepatan pelaksanaan kebijakan rumah sakit tanpa kelas. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu dr. Sandrawati Said pada tanggal 26 Maret 2019 dan pasien RSUD Nyi Ageng Serang pada tanggal 26 Maret 2019. Wawancara dilakukan di RSUD Nyi Ageng Serang pukul 10:30 WIB sampai dengan 12:30 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu dr. Sandrawati Said selaku Direktur RSUD Nyi Ageng Serang, pelaksanaan kebijakan rumah sakit tanpa kelas di RSUD Nyi Ageng Serang sudah tepat. Ibu dr. Sandrawati Said dalam wawancaranya mengemukakan beberapa alasan ketepatan pelaksanaan kebijakan rumah sakit tanpa kelas. Pertama, kebijakan ini mampu memberikan kemudahan akses kepada masyarakat miskin di Kabupaten Kulon Progo untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasien atau calon pasien

RSUD Nyi Ageng tidak perlu khawatir dengan penuhnya ruang rawat inap kelas tiga karena pasien atau calon pasien dapat naik kelas secara sementara. Kedua, Ibu Sandrawati Said mengemukakan bahwa sampai pada tahun 2019, RSUD Nyi Ageng Serang tidak pernah menolak pasien karena memiliki kebijakan rumah sakit tanpa kelas.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pasien yang pernah atau sedang menjalani rawat inap di RSUD Nyi Ageng Serang untuk melihat ketepatan pelaksanaan kebijakan rumah sakit tanpa. Pasien pertama yang diwawancarai oleh peneliti adalah Ibu Juminem yang berprofesi sebagai petani mengatakan bahwa beliau merasakan manfaat yang didapatkan dalam pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Nyi Ageng Serang. Manfaat yang didapatkan oleh Ibu Juminem adalah terbantunya pemindahan kelas yang dilakukan pihak rumah sakit kepada pasien rawat inap. Kemudahan pemindahan ruang rawat inap dirasakan oleh Ibu Juminem selaku pasien rumah sakit.

Senada dengan pendapat Ibu Juminem, Ibu Sitriani dalam wawancaranya juga mengemukakan bahwa beliau merasakan manfaat atau kegunaan dari pelaksanaan kebijakan rumah sakit tanpa kelas di RSUD Nyi Ageng Serang. Berikut di bawah ini adalah kutipan wawancara dengan Ibu Sitriani.

“Manfaate itu kemarin saya sakit dan dirujuk ke rumah sakit ini itu pas ruangan kelas 3 penuh mas terus pihak rumah sakit yang membantu untuk melakukan pemindahan ruangan ke kelas 2. Saya merasa terbantu mas dengan pemindahan ruang rawat inap sudah diurus rumah sakitnya”.

Pasien ketiga Bapak Joko Santoso mengatakan bahwa pemindahan ruang rawat inap dikarenakan ruang rawat kelas 3 penuh maka beliau dipindahkan keruang rawat inap kelas 2. Penuhnya pasien yang dirawat di kelas 3 menjadikan rumah sakit melakukan pemindahan kelas sementara. Pemindahan ruang rawat inap dari kelas 3 ke kelas 2 dibantu dari pihak rumah sakit. Bapak Joko Santoso merasa terbantu dengan adanya pelayanan kebijakan rumah sakit tanpa kelas.

Pemaparan dari beberapa narasumber di atas akan menjadi dasar penilaian ketepatan pelaksanaan kebijakan rumah sakit tanpa kelas di RSUD Nyi Ageng Serang. Dari seluruh pasien yang diwawancarai oleh peneliti, ditemukanlah fakta bahwa pasien telah mendapatkan manfaat dari pelaksanaan kebijakan rumah sakit tanpa kelas. Manfaat pertama adalah kemudahan untuk naik kelas karena pihak rumah sakit sudah mengurus prosedur pemindahan kelas. Manfaat kedua yang diterima oleh pasien dari pelaksanaan kebijakan rumah sakit tanpa kelas adalah jaminan rumah sakit untuk tidak menolak pasien jika ruangan rawat inap kelas 3. Selanjutnya dari data yang ditemukan dilapangan pihak rumah sakit sudah mengclaim bahwa kebijakan rumah sakit tanpa kelas sudah tepat sasaran. Hal tersebut dibuktikan pada tabel 3.4 menjelaskan bahwa kebijakan rumah sakit tanpa kelas hingga tahun 2016 sudah tepat sasaran.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan rumah sakit tanpa kelas di RSUD Nyi Ageng Serang sudah memenuhi indikator ketepatan karena kebijakan rumah sakit tanpa kelas sudah memberikan

manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan berdasarkan temuan data lapangan menunjukkan bahwa pihak rumah sakit sudah memenuhi indikator yang sudah ditetapkan yaitu ketepatan kebijakan rumah sakit tanpa kelas dan efektifitas kebijakan rumah sakit tanpa kelas.

PENUTUP

KESIMPULAN

Secara garis besar kebijakan rumah sakit tanpa kelas sudah memenuhi beberapa indikator evaluasi kebijakan yang meliputi efektivitas, kecukupan, responsivitas dan ketepatan. Terdapat dua indikator yang tidak terpenuhi yaitu efisiensi dan pemerataan. Indikator efisiensi tidak terpenuhi karena pihak RSUD Nyi Ageng Serang tidak menyerap anggaran secara maksimal. Tidak menyerap anggaran secara maksimal tersebut akibat dari implementasi kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas dan penghematan belanja penggandaan . Selanjutnya, indikator pemerataan tidak terpenuhi karena pihak RSUD Nyi Ageng Serang tidak menetapkan kuota pasien. Berdasarkan uraian tersebut hasil evaluasi kebijakan rumah sakit tanpa kelas di RSUD Nyi Ageng Serang sudah baik meskipun ada dua indikator yang tidak terpenuhi yaitu indikator efisiensi dan pemerataan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka didapatkan beberapa saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. RSUD Nyi Ageng Serang seharusnya sebelum memutuskan suatu kebijakan penghematan anggaran sebaiknya dipertimbangkan terlebih dahulu secara matang sebelum melakukan penghematan anggaran agar pada tahun

selanjutnya anggaran yang diberikan Kabupaten Kulon Progo dapat terserap secara maksimal.

2. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebaiknya menambahkan anggaran untuk RSUD Nyi Ageng Serang untuk menambah fasilitas rumah sakit dan menambah sumber daya manusia. Sehingga RSUD Nyi Ageng Serang dapat menambah fasilitas untuk menangani peningkatan pasien yang berobat di RSUD Nyi Ageng Serang. Penambahan tenaga kerja yang berada di RSUD Nyi Ageng Serang dapat meringankan pegawai yang menangani peningkatan pasien